



Jurnal Ekspos

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan
Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus



Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Kebijakan Pendukung Pendidikan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia

Andita Ratih^{1✉}, Gisela Adio Ros Maria^{2✉}

^{1,2} Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kudus

✉ andita.ratih@gmail.com¹, giselaadio@gmail.com²

Info Artikel

Riwayat:

Diterima :

Direvisi :

Disetujui :

Kata kunci:

Investasi Sosial; Makan
Bergizi Gratis; Tata
Kelola Program;
Pendidikan; SPPG.

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan lintas sektor yang dirancang untuk meningkatkan status gizi sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia. Dalam perspektif kebijakan publik, MBG dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial yang bertujuan menciptakan kondisi awal bagi keberlangsungan pendidikan dan pembangunan manusia jangka panjang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi MBG di Kabupaten Kudus dengan menitikberatkan pada distribusi spasial dan kesiapan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) antarwilayah, serta implikasinya terhadap peran MBG sebagai kebijakan pendukung pendidikan. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif yang diperkaya dengan analisis kuantitatif sederhana, dengan memanfaatkan data operasional SPPG dan data sekunder bidang pendidikan sebagai informasi pendukung. Analisis dilakukan melalui pendekatan deskriptif, komparatif antarwilayah, dan analisis spasial berbasis peta sebaran SPPG. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi distribusi dan kesiapan operasional SPPG antar kecamatan, yang mencerminkan perbedaan kapasitas administratif, kesiapan fasilitas, serta konteks geografis wilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerataan implementasi MBG pada tahap awal sangat dipengaruhi oleh kesiapan operasional di tingkat daerah. Dalam konteks pendidikan, MBG berperan sebagai *enabling policy* yang mendukung keberlangsungan kehadiran dan kesiapan belajar peserta didik, meskipun tidak secara langsung mengintervensi proses pembelajaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi MBG sebagai investasi sosial dalam pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia memerlukan penguatan tata kelola, konsistensi standar operasional, serta sinergi lintas sektor di tingkat daerah.

Abstract

Keywords:

Education; Program
Governance; School
Feeding Program;
School Feeding Service
Units; Social
Investment.

The School Feeding Program (Program Makan Bergizi Gratis/MBG) is a cross-sector public policy initiative designed to improve nutritional status while supporting long-term human capital development. From a public policy perspective, MBG can be understood as a form of social investment that creates enabling conditions for education and sustainable human development. This study analyzes the implementation of MBG in Kudus Regency, Indonesia, with a focus on the spatial distribution and operational readiness of School Feeding Service Units (SPPG) across sub-districts and its implications for education-supporting policy at the local

level. The study employs a descriptive qualitative approach enriched with simple quantitative analysis, using operational SPPG data and secondary education data as contextual information. Analysis is conducted through descriptive, comparative, and spatial approaches. The findings reveal notable variation in the distribution and operational readiness of SPPG units, reflecting differences in administrative capacity, facility preparedness, and geographical conditions. Interestingly, areas with greater geographical constraints tend to have a higher number of operational units, indicating an affirmative service distribution strategy. The study concludes that optimizing MBG as a social investment in education and human capital development requires strengthened governance, consistent operational standards, and enhanced cross-sector coordination at the local level.

ISSN 3110-570X (Print)

ISSN 3110-4932 (Online)

PENDAHULUAN

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu instrumen kebijakan publik strategis yang dirancang untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, serta mendukung pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan. Dalam konteks pembangunan daerah, MBG tidak dapat dipahami semata sebagai program penyediaan makanan, melainkan sebagai intervensi lintas sektor yang beririsan langsung dengan bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Program ini beroperasi dalam kerangka pemerataan layanan berbasis kebutuhan (*need-based allocation*), yang menempatkan distribusi intervensi sesuai dengan kondisi sosial, ekonomi, demografis, dan geografis suatu wilayah. Dalam perspektif kebijakan publik, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dapat dipahami sebagai program bantuan sosial, tetapi juga sebagai bentuk investasi sosial (*social investment*) dalam pembangunan manusia. Pendekatan investasi sosial menempatkan belanja publik pada sektor-sektor yang mampu menghasilkan manfaat jangka panjang melalui peningkatan kapasitas individu, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Dalam kerangka ini, MBG berfungsi sebagai intervensi awal yang menciptakan kondisi dasar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi, keberlangsungan pendidikan, dan kesiapan belajar peserta didik, tanpa secara langsung mengintervensi kurikulum atau proses pembelajaran di ruang kelas. Dari perspektif pendidikan, pemenuhan gizi peserta didik merupakan prasyarat penting bagi keberlangsungan kehadiran sekolah, peningkatan konsentrasi belajar, serta pencapaian hasil belajar yang optimal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kekurangan gizi berkorelasi dengan rendahnya fungsi kognitif, tingginya tingkat ketidakhadiran, serta meningkatnya risiko putus sekolah, terutama pada kelompok sosial ekonomi rentan. Oleh karena itu, MBG tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kesehatan, tetapi juga berpotensi memperkuat akses dan keberlanjutan pendidikan sebagai bagian dari investasi jangka panjang pembangunan manusia.

Penelitian internasional secara konsisten menunjukkan bahwa program makanan gratis di sekolah memberikan dampak positif pada dimensi kesehatan dan pendidikan. Cohen et al. (2021) serta McKelvie-Sebileau et al. (2023) menemukan bahwa pemberian makanan bergizi gratis mampu meningkatkan kualitas diet anak, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, serta mendorong peningkatan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah. Andreyeva et al. (2021) menegaskan bahwa dampak tersebut paling signifikan dirasakan oleh anak-anak dari keluarga berpendapatan rendah, sehingga program makanan gratis berperan penting dalam mengurangi ketimpangan kesempatan belajar. Namun demikian, efektivitas program makan gratis tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan makanan. Mauer et al. (2022) menunjukkan bahwa preferensi makanan, pengalaman makan bersama, serta kualitas pengelolaan layanan turut memengaruhi tingkat partisipasi dan penerimaan siswa. Dalam konteks negara berkembang, faktor tata kelola, kapasitas pelaksana, dan kesiapan infrastruktur menjadi variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi program di tingkat lokal. Pengalaman

internasional memberikan pembelajaran penting bagi Indonesia. *Program National School Lunch Program* (NSLP) di Amerika Serikat menunjukkan keberhasilan melalui dukungan regulasi yang kuat, pendanaan berkelanjutan, serta sistem pengawasan mutu yang ketat (Prawijaya et al., 2025). Sementara itu, Jepang melalui program *Kyūshoku* menawarkan model yang relevan dengan konteks Indonesia karena kesamaan struktur pendidikan dan budaya makan. Keberhasilan *Kyūshoku* tidak hanya ditopang oleh standar gizi dan sanitasi yang tinggi, tetapi juga oleh integrasi antara kebijakan pendidikan, kesehatan, dan pemerintah daerah, serta pemanfaatan program sebagai sarana pendidikan karakter dan gizi (Auliawan et al., 2025).

Selain berdampak pada kesehatan dan pendidikan, MBG juga memiliki potensi *multiplier effect* ekonomi yang signifikan. Penelitian Ramlan et al. (2025) dan Basit et al. (2025) menunjukkan bahwa program makan gratis dapat mendorong permintaan bahan pangan lokal, memperkuat peran usaha mikro dan kecil, serta menggerakkan ekonomi wilayah apabila rantai pasok lokal terintegrasi secara optimal. Dengan demikian, MBG berpotensi menjadi instrumen kebijakan yang memberikan manfaat simultan pada dimensi sosial, pendidikan, dan ekonomi daerah. Dalam konteks Indonesia, evaluasi awal pelaksanaan MBG menunjukkan capaian yang beragam. Oktarina et al. (2025) mencatat bahwa program ini relatif kuat pada aspek teknis distribusi dan keamanan pangan, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek manajerial dan koordinasi antarinstansi. Lendra et al. (2025) menegaskan bahwa prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik menjadi penopang utama tata kelola MBG, namun implementasinya belum merata di seluruh daerah. Sementara itu, Agustini et al. (2025) menemukan bahwa MBG berpotensi meningkatkan kehadiran sekolah dan status gizi peserta didik, meskipun dampaknya sangat dipengaruhi oleh kapasitas daerah dan kualitas pelaksanaan di tingkat operasional.

Pada tingkat daerah, khususnya Kabupaten Kudus, data operasional SPPG menunjukkan adanya variasi distribusi unit layanan, kesiapan administratif, serta kondisi sanitasi antarwilayah. Variasi ini mencerminkan dinamika implementasi kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Grindle (1997) mengenai pentingnya kapasitas administratif, serta oleh Lipsky (2010) terkait peran pelaksana garis depan dalam menentukan kualitas layanan publik. Selain itu, keterlibatan rantai pasok lokal dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Kudus masih belum optimal, sehingga potensi *multiplier effect* ekonomi dan penguatan ekosistem pendukung pendidikan belum sepenuhnya terealisasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas MBG sebagai investasi sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kesiapan operasional di tingkat daerah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dan implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kudus dengan menitikberatkan pada distribusi spasial dan kesiapan operasional Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) antarwilayah, serta implikasinya terhadap peran MBG sebagai investasi sosial dalam mendukung pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif–kualitatif yang diperkaya dengan analisis kuantitatif sederhana untuk menganalisis implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Kudus. Pendekatan ini dipilih karena studi kebijakan lintas sektor memerlukan pemahaman terhadap pola distribusi layanan, kesiapan operasional, serta dinamika tata kelola di tingkat daerah. Kerangka analisis penelitian merujuk pada teori implementasi kebijakan Grindle (1997) yang menekankan peran kapasitas administratif dan konteks kelembagaan, serta konsep *street-level bureaucracy* dari Lipsky (2010) yang memandang pelaksana lapangan sebagai aktor kunci dalam menentukan kualitas implementasi kebijakan publik. Data utama penelitian bersumber dari dokumen operasional SPPG di seluruh kecamatan Kabupaten Kudus, yang meliputi jumlah unit SPPG, status operasional (telah dan belum beroperasi), kesiapan administratif, serta pemenuhan standar sanitasi dan higiene. Data ini digunakan untuk menggambarkan distribusi spasial dan kesiapan operasional layanan MBG antarwilayah. Untuk memperkaya konteks analisis, digunakan pula data sekunder bidang pendidikan sebagai informasi pendukung, tanpa dimaksudkan untuk menguji hubungan kausal secara langsung. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif dan komparatif antarwilayah, yang diperkaya dengan analisis spasial deskriptif menggunakan peta sebaran SPPG. Analisis difokuskan

pada identifikasi pola distribusi layanan, variasi kesiapan operasional, serta implikasinya terhadap tata kelola implementasi MBG di tingkat daerah. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai peran MBG sebagai investasi sosial dalam mendukung pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, dengan menekankan konteks implementasi kebijakan di Kabupaten Kudus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Distribusi dan Kesiapan Operasional SPPG Antar Wilayah

Temuan penelitian menunjukkan adanya variasi distribusi dan kesiapan operasional SPPG antar kecamatan di Kabupaten Kudus. Data memperlihatkan perbedaan jumlah SPPG yang telah beroperasi dan yang belum beroperasi di setiap wilayah, yang mencerminkan tingkat kesiapan implementasi Program MBG yang belum sepenuhnya merata. Kondisi ini mengindikasikan bahwa realisasi operasional program di tingkat daerah tidak hanya ditentukan oleh perencanaan kebijakan, tetapi juga oleh kesiapan administratif, ketersediaan fasilitas, serta konteks wilayah masing-masing kecamatan.

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 1, terdapat total 74 SPPG yang direncanakan di Kabupaten Kudus, dengan 58 unit telah beroperasi dan 16 unit belum beroperasi. Kecamatan Kota dan Dawe tercatat memiliki jumlah SPPG yang telah beroperasi relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lain, sementara beberapa wilayah masih menghadapi keterbatasan dalam mengaktifkan seluruh SPPG yang direncanakan. Variasi ini menunjukkan bahwa pemerataan layanan MBG pada tahap implementasi awal masih menghadapi tantangan struktural, terutama terkait kesiapan operasional di tingkat kecamatan. Menariknya, peta sebaran SPPG yang telah beroperasi memperlihatkan pola spasial yang tidak sepenuhnya mengikuti asumsi umum bahwa wilayah dataran rendah atau kawasan perkotaan akan memiliki tingkat kesiapan layanan yang lebih tinggi. Beberapa kecamatan yang secara geografis berada pada wilayah dengan ketinggian relatif lebih tinggi justru menunjukkan jumlah SPPG beroperasi yang lebih besar dibandingkan wilayah dataran rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa distribusi SPPG tidak semata-mata didasarkan pada kepadatan wilayah atau karakteristik perkotaan, melainkan juga mempertimbangkan faktor aksesibilitas dan potensi kerentanan geografis.

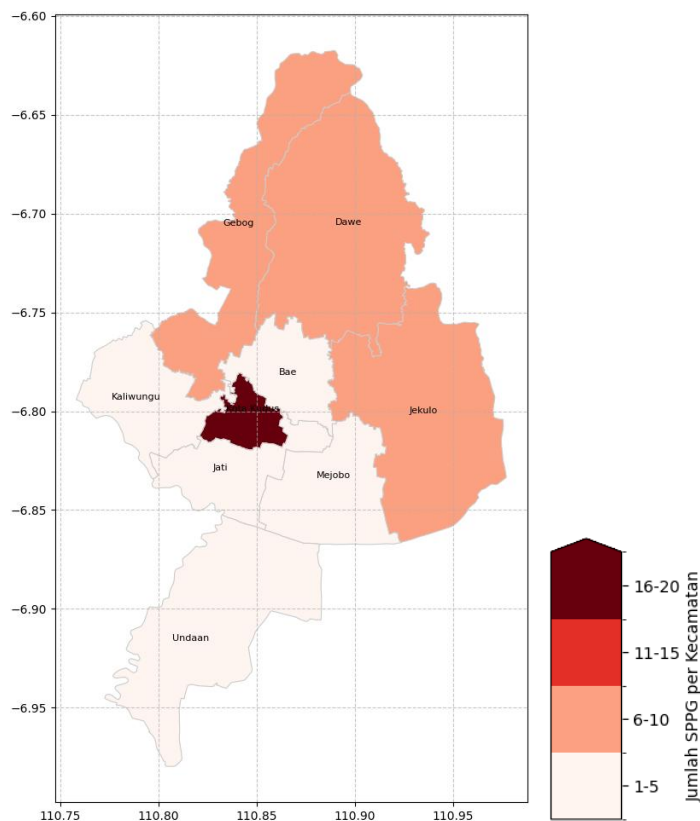
Dalam perspektif kebijakan publik, temuan ini dapat dibaca sebagai upaya afirmatif untuk memastikan ketersediaan layanan gizi di wilayah yang secara struktural berpotensi menghadapi hambatan akses. Pendekatan semacam ini sejalan dengan prinsip pemerataan berbasis kebutuhan (*need-based allocation*), di mana distribusi unit layanan diarahkan untuk menjamin keterjangkauan program bagi kelompok sasaran di wilayah yang lebih sulit dijangkau. Namun demikian, perbedaan jumlah SPPG yang telah dan belum beroperasi antarwilayah juga menunjukkan bahwa kesiapan administratif dan fasilitas masih menjadi faktor pembatas dalam mencapai pemerataan implementasi program secara menyeluruh. Temuan ini selaras dengan kajian internasional yang menunjukkan bahwa variasi distribusi unit layanan pada program makanan gratis merupakan fenomena yang lazim dan sering kali berkaitan dengan kapasitas institusional daerah serta konteks lokal masing-masing wilayah. Cohen et al. (2021) dan McKelvie-Sebileau et al. (2023) menegaskan bahwa perbedaan distribusi layanan tidak selalu mencerminkan ketimpangan kebijakan, tetapi dapat mencerminkan strategi implementasi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. Dalam konteks nasional, Oktarina et al. (2025) juga menekankan bahwa kesiapan manajerial dan administratif pemerintah daerah merupakan faktor kunci dalam menentukan kecepatan dan pemerataan implementasi program gizi.

Dengan demikian, variasi distribusi dan kesiapan operasional SPPG antarwilayah di Kabupaten Kudus mencerminkan dinamika implementasi kebijakan MBG pada tahap awal. Pola spasial yang menunjukkan tingginya jumlah SPPG beroperasi di wilayah ketinggian memberikan gambaran bahwa pertimbangan geografis dan aksesibilitas memainkan peran penting dalam desain implementasi program. Namun, untuk memastikan pemerataan manfaat secara substantif, diperlukan penguatan kesiapan operasional dan administratif di wilayah yang SPPG-nya belum beroperasi secara optimal.

Tabel 1. Jumlah SPPG Berdasarkan Status Operasional per Kecamatan di Kabupaten Kudus

No.	Kecamatan	Jumlah SPPG	
		Belum Beroperasi	Sudah Beroperasi
1.	Undaan	1	2
2.	Dawe	3	6
3.	Kaliwungu	4	4
4.	Kota	1	18
5.	Jati	2	5
6.	Gebog	1	8
7.	Mejobo	2	4
8.	Jekulo	2	6
9.	Bae	0	5
Total		16	58
Grand Total		74	

Sumber: Bappeda Kabupaten Kudus (diolah) per 9 Desember 2025



Gambar 1. Peta Sebaran Jumlah SPPG yang Telah Beroperasi per Kecamatan per 9 Desember 2025

2. Kesiapan Administratif dan Sertifikasi Sanitasi

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah adanya SPPG yang belum dapat beroperasi karena proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) belum diselesaikan. Hambatan ini menunjukkan bahwa kesiapan administratif belum sepenuhnya sejalan dengan kebutuhan program. Dalam perspektif Grindle (1997), keterlambatan pemenuhan persyaratan administratif seperti SLHS merupakan indikasi bahwa kapasitas administratif pemerintah daerah menghadapi tekanan ketika berada pada situasi implementasi cepat (*rapid implementation pressure*). Penelitian internasional menegaskan bahwa standar higienitas yang ketat merupakan pilar keberhasilan program makan gratis. Jepang, melalui model *Kyūshoku*, menjadikan standar gizi dan sanitasi yang konsisten sebagai fondasi utama program (Auliawan et al., 2025). NSLP di Amerika Serikat juga bergantung pada regulasi federal untuk memastikan

keamanan pangan (Prawijaya et al., 2025). Oleh karena itu, kondisi di Kudus memperlihatkan bahwa meskipun program memiliki arah kebijakan tepat, aspek administratif dapat menjadi titik lemah bila tidak disertai peningkatan kapasitas birokrasi. Temuan Rahmatullah et al. (2023) terkait sentimen publik negatif terhadap program makan gratis di Indonesia dapat pula dihubungkan dengan hambatan administratif semacam ini, karena keterlambatan implementasi sering kali memengaruhi persepsi publik terhadap efektivitas program.

3. Infrastruktur, Sanitasi, dan Pengelolaan Limbah

Kondisi infrastruktur dapur SPPG bervariasi, dengan sebagian dapur yang memiliki fasilitas sanitasi memadai, sementara lainnya menghadapi keterbatasan ruang, peralatan, dan sistem pengelolaan limbah. Variasi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan standar teknis, padahal keamanan pangan merupakan prasyarat utama dalam program makan gratis sebagaimana ditegaskan oleh FAO & WHO (2006). Dapur dengan beban layanan besar menghasilkan volume limbah yang cukup tinggi, yang tidak selalu dapat dikelola dengan baik. Kondisi ini berimplikasi pada risiko kesehatan lingkungan dan dapat mempengaruhi kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat. Dalam konteks implementasi kebijakan publik, variasi kondisi sanitasi ini menunjukkan bahwa standar pelayanan yang ditetapkan belum sepenuhnya diinternalisasi oleh pelaksana program pada level operasional. Dalam perbandingan internasional, Jepang kembali memberikan ilustrasi paling relevan. *Kyūshoku* menempatkan sanitasi sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan, sehingga standar yang diterapkan bersifat menyeluruh dan menghimpun partisipasi sekolah, tenaga kesehatan, serta pemerintah daerah (Auliawan et al., 2025). Ketidakkonsistenan kondisi di Kudus memperlihatkan bahwa integrasi semacam itu belum sepenuhnya terbentuk.

4. Dinamika Pelaksana Lapangan dan Kepatuhan SOP

Kepatuhan terhadap SOP menunjukkan variasi antar-SPPG dan sangat dipengaruhi oleh kompetensi tenaga pengolah, ketersediaan pelatihan, serta budaya kerja internal. Variasi ini konsisten dengan teori *street-level bureaucracy* (Lipsky, 2010), yang menyatakan bahwa pelaksana di lapangan sering kali menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan keterbatasan yang mereka hadapi sehari-hari. Pengawasan melalui CCTV memang meningkatkan akuntabilitas, tetapi tidak mampu menggantikan kebutuhan akan pembinaan dan peningkatan kompetensi teknis. Penelitian Mauer et al. (2022) menunjukkan bahwa kualitas pengalaman makan dipengaruhi oleh kompetensi penyaji dan pengolah makanan, sehingga faktor manusia tetap menjadi penentu utama keberhasilan intervensi gizi. Dalam konteks nasional, Lendra et al. (2025) menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola program gizi bergantung pada integritas pelaksana dan budaya organisasi yang mendukung akuntabilitas. Dengan demikian, temuan di Kabupaten Kudus memperlihatkan bahwa pelatihan berbasis kompetensi dan pembinaan perilaku kerja merupakan bagian penting dari penguatan implementasi program.

5. Implikasi MBG terhadap Aspek Pendidikan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berperan sebagai *enabling policy* yang menciptakan kondisi awal bagi berlangsungnya proses pendidikan secara lebih efektif. MBG tidak secara langsung mengintervensi kurikulum atau metode pembelajaran, tetapi berpotensi memengaruhi dimensi pendidikan melalui perbaikan kondisi fisik, kesehatan, dan kesiapan belajar peserta didik. Dalam konteks implementasi kurikulum, Andi Prastowo et al. (2014) menunjukkan bahwa keberhasilan kurikulum sangat dipengaruhi oleh terpenuhinya berbagai standar pendidikan, khususnya Standar Proses, Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, dan Standar Penilaian. MBG dapat diposisikan sebagai faktor pendukung eksternal yang memperkuat Standar Proses, karena kecukupan gizi berkontribusi pada konsentrasi, partisipasi, dan keberlangsungan pembelajaran sesuai rancangan kurikulum. Lebih lanjut, pendidikan berperan strategis dalam membentuk karakter kritis, merdeka, dan toleran di tengah dinamika globalisasi (Jihan Abyaz et al., 2024). Dalam kerangka ini, MBG mendukung transformasi pendidikan secara tidak langsung dengan menciptakan lingkungan belajar yang lebih stabil dan kondusif, sehingga sekolah memiliki ruang yang lebih besar untuk mengembangkan metode pembelajaran, kemampuan berpikir peserta didik, serta nilai inklusivitas.

Dari perspektif sistem pendukung pendidikan, literatur *Comprehensive School Counseling* menegaskan bahwa keberhasilan pendidikan ditentukan pula oleh kemampuan sekolah mengurangi hambatan belajar siswa melalui layanan pendukung kesehatan dan kesejahteraan psikososial (Connecticut State Board of Education, 2008). Dalam kerangka ini, MBG merupakan bagian dari ekosistem layanan pendukung pendidikan bersama konseling dan layanan kesehatan sekolah. Implikasi tersebut tercermin pada indikator kehadiran dan retensi siswa, serta potensi peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dan penurunan risiko putus sekolah (ATS), khususnya pada kelompok rentan. Meskipun penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menarik kesimpulan kausal langsung mengenai dampak MBG terhadap capaian kurikulum atau pembentukan karakter, temuan ini memperkuat argumen bahwa MBG beroperasi sebagai investasi sosial, karena manfaat program tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan gizi jangka pendek, tetapi berkontribusi pada peningkatan keberlangsungan pendidikan, kesiapan belajar, dan potensi akumulasi modal manusia dalam jangka panjang.

6. Potensi *Multiplier Effect* dan Integrasi Rantai Pasok Lokal

Penelitian ini menemukan bahwa potensi keterlibatan rantai pasok lokal belum tergarap secara optimal. Padahal, penelitian internasional dan nasional menunjukkan bahwa program makanan gratis dapat menciptakan *multiplier effect* ekonomi yang signifikan bila rantai pasok lokal terintegrasi ke dalam sistem pengadaan. Ramlan et al. (2025) serta Basit et al. (2025) mengungkapkan bahwa permintaan bahan pangan lokal dapat meningkat seiring keberlanjutan program, sehingga memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi komunitas. Dalam kerangka teori *local economic linkage* (Hirschman, 1958; Porter, 1998), keterlibatan UMKM, koperasi desa, dan pelaku pertanian daerah dapat menghasilkan dampak berantai positif yang memperkuat ekonomi lokal. Kondisi di Kudus menunjukkan bahwa potensi tersebut baru berada pada tahap awal karena keterlibatan pemasok lokal belum proporsional dengan kapasitas daerah. Hal ini memperlihatkan perlunya penguatan desain pengadaan yang didasarkan pada pemetaan produksi lokal serta standar mutu yang dapat dipenuhi oleh UMKM dan pelaku pertanian di wilayah tersebut.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Program MBG di Kabupaten Kudus merupakan kebijakan lintas sektor yang strategis dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia, namun efektivitas awal pelaksanaannya sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola dan kesiapan operasional di tingkat daerah. Temuan penelitian memperlihatkan adanya variasi distribusi spasial dan kesiapan operasional SPPG antarwilayah, yang tercermin dari perbedaan jumlah SPPG yang telah dan belum beroperasi di setiap kecamatan. Variasi tersebut menunjukkan bahwa pemerataan implementasi program belum sepenuhnya tercapai dan masih dipengaruhi oleh kapasitas administratif, kesiapan fasilitas, serta konteks geografis wilayah. Pola distribusi spasial SPPG menunjukkan temuan yang menarik, di mana wilayah dengan karakteristik geografis tertentu, termasuk kawasan dengan ketinggian relatif lebih tinggi, justru memiliki jumlah SPPG beroperasi yang lebih besar dibandingkan wilayah dataran rendah. Pola ini mengindikasikan bahwa implementasi MBG tidak semata-mata mengikuti logika kepadatan wilayah atau karakteristik perkotaan, tetapi juga mempertimbangkan aspek aksesibilitas dan potensi kerentanan geografis. Dalam perspektif kebijakan publik, temuan ini mencerminkan adanya pendekatan afirmatif dalam penyediaan layanan gizi, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi tantangan pada aspek kesiapan operasional dan administratif di sejumlah wilayah.

Dari perspektif tata kelola, hasil penelitian mengonfirmasi pentingnya kapasitas administratif dan peran pelaksana lapangan dalam menentukan kualitas implementasi kebijakan, sebagaimana ditegaskan dalam teori implementasi kebijakan. Ketidaksiapan administratif, ketidakkonsistenan standar teknis, serta variasi kompetensi pelaksana berimplikasi pada perbedaan kesiapan operasional SPPG antarwilayah. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan di tingkat pusat, tetapi sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan dan praktik implementasi di tingkat daerah. Dalam konteks pendidikan, MBG berperan sebagai *enabling policy* yang menciptakan kondisi awal bagi keberlangsungan pendidikan melalui peningkatan kehadiran dan kesiapan belajar peserta didik. Program ini tidak secara langsung mengintervensi kurikulum atau

proses pembelajaran, tetapi berkontribusi pada stabilitas lingkungan belajar yang mendukung pelaksanaan pendidikan, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan. Dengan demikian, MBG memperkuat fungsi pendidikan secara tidak langsung sebagai bagian dari upaya pembangunan manusia jangka panjang. Selain itu, MBG memiliki potensi *multiplier effect* ekonomi melalui keterlibatan rantai pasok lokal dan pelaku usaha di daerah. Namun, temuan penelitian menunjukkan bahwa potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal di Kabupaten Kudus. Keterbatasan integrasi dengan pemasok lokal mengindikasikan perlunya penguatan desain pengadaan dan koordinasi lintas sektor agar manfaat sosial dan ekonomi program dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Kudus dapat dipahami sebagai bentuk investasi sosial dalam pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia, yang manfaat jangka panjangnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kesiapan operasional, dan penguatan tata kelola di tingkat daerah. Optimalisasi dampak MBG memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, konsistensi standar teknis, serta sinergi yang lebih kuat antara sektor gizi, pendidikan, dan ekonomi lokal. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan MBG yang lebih adaptif, terintegrasi, dan berorientasi jangka panjang di tingkat daerah, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan mengenai dampak program terhadap indikator pendidikan dan pembangunan manusia secara lebih terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, N. K. A., Wulandari, N. P. R., & Putra, I. G. N. W. (2025). Implementasi program makan bergizi gratis dalam meningkatkan kesehatan dan kehadiran peserta didik. *Jurnal Kebijakan Publik*, 12(1), 45–60.
- Andreyeva, T., Kenney, E. L., O'Connell, M., & Schwartz, M. B. (2021). Impact of free school meals on student participation, attendance, and academic outcomes. *Journal of School Health*, 91(4), 321–330.
- Auliawan, R., Sari, D. P., & Nugroho, H. (2025). Lessons from Japan's Kyūshoku program: School meals and human development policy. *Asian Education and Development Studies*, 14(2), 215–229.
- Basit, A., Rahman, F., & Yusuf, M. (2025). School feeding programs and local economic multipliers: Evidence from developing regions. *World Development Perspectives*, 29, 100490.
- Cohen, J. F. W., Hecht, A. A., McLoughlin, G. M., Turner, L., & Schwartz, M. B. (2021). Universal school meals and associations with student participation, diet quality, and food security. *American Journal of Public Health*, 111(9), 1717–1725.
- Connecticut State Board of Education. (2008). *A guide to comprehensive school counseling program development*. Connecticut State Board of Education.
- FAO & WHO. (2006). *Food safety risk analysis: A guide for national food safety authorities*. FAO.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries*. Harvard Institute for International Development.
- Hirschman, A. O. (1958). *The strategy of economic development*. Yale University Press.
- Jihan Abyaz, A., Rahmawati, L., & Suryadi, B. (2024). Transformasi pendidikan dan pembentukan karakter kritis di era globalisasi. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 29(3), 201–215.
- Lendra, F., Prasetyo, D., & Mulyani, S. (2025). Tata kelola program publik dan akuntabilitas implementasi kebijakan gizi sekolah. *Jurnal Administrasi Publik*, 19(2), 87–102.
- Lipsky, M. (2010). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. Russell Sage Foundation.
- Mauer, K. W., Sumberg, J., & Roodhuyzen, D. M. A. (2022). Student perceptions of school meal quality and participation. *Food Policy*, 108, 102224.

- McKelvie-Sebileau, P., Rees, G., & Edwards, A. (2023). School feeding and child well-being: Evidence from low- and middle-income countries. *International Journal of Educational Development, 96*, 102696.
- Oktarina, R., Santoso, B., & Wicaksono, A. (2025). Evaluasi awal pelaksanaan program makan bergizi gratis di Indonesia. *Jurnal Gizi Dan Kebijakan Kesehatan, 10*(1), 1–14.
- Porter, M. E. (1998). *The competitive advantage of nations*. Free Press.
- Prastowo, A. (2014). Pemenuhan Kebutuhan Psikologis Peserta Didik SD/MI Melalui Pembelajaran Tematik-Terpadu. *JPSD: Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 1*(1), 1–13.
- Prawijaya, A., Hartono, Y., & Kusuma, D. (2025). Governance and accountability in the National School Lunch Program: Policy implications for developing countries. *Public Administration and Development, 45*(1), 66–82.
- Rahmatullah, Achmad Fauzi Kusmin, & Hendrawan. (2023). STUDI LITERATUR: PERAN MODAL SOSIAL DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Jurnal Arajang, 6*(1), 49–58. <https://doi.org/10.31605/arajang.v6i1.2804>
- Ramlan, M., Hadi, S., & Nuraini, R. (2025). School feeding programs and regional economic development: Evidence from Indonesia. *Journal of Regional Development Policy, 7*(1), 55–71.